

PRAKTIK KLIENTELISME DAN DEGRADASI FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU 2024

Atsni Maulidia¹, Adik Saiful Yulianto Safikri², Ali Martin^{3✉}, Achmad Maulani⁴

Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang
E-mail alimartin@unwahas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini fokus pada praktik-praktik Klientilisme pada Pemilu 2024, dan menurunnya citra, degradasi fungsi Partai Politik dalam Pemilu 2024 yang lalu dengan berbagai peristiwa. Dengan menggunakan teori patron-client serta konsep-konsep dasar partai politik, metode penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif untuk menjelaskan pembuktian hasil riset penelitian ini, yang mana praktik Kleintilisme menjadikan menjamurnya pragmatisme politik warga/masyarakat yang semakin transaksional, hilangnya ikatan identitas partai politik, serta mudarnya kohesi partai politik dengan konstituennya serta merusak asas substansi demokrasi tersebut pula.

Kata kunci: Kleintelisme, Partai Politik, Pemilu 2024

A. PENDAHULUAN

Partai politik memiliki peran sentral dalam sistem politik demokrasi di seluruh dunia. Sebagai agen utama dalam representasi politik, mereka tidak hanya melaksanakan kordinasi aspirasi dan kepentingan masyarakat, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan dan implementasi kebijakan publik (Martin:2010). Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang fungsi partai politik sangat penting untuk mengukur kesehatan demokrasi suatu negara

Peran utama partai politik termasuk menyediakan alternatif pilihan politik bagi pemilih, memobilisasi dukungan publik, dan membentuk mayoritas legislatif yang memungkinkan pemerintahan efektif. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas pengawasan dan akuntabilitas terhadap pemerintahan, serta menjadi wadah bagi partisipasi politik aktif dari masyarakat (Dahl:1998, Surbakti: 2010).

Namun, di tengah dinamika politik modern, peran tradisional partai politik sering kali dihadapkan pada tantangan. Berbagai faktor seperti fragmentasi ideologis, globalisasi, dan perubahan sosial ekonomi telah mengubah lanskap politik di mana partai politik beroperasi. Hal ini mengundang pertanyaan kritis tentang relevansi dan adaptabilitas partai politik dalam menjawab aspirasi masyarakat masa kini.

Selain itu, maraknya praktik klientelisme dan pengaruh uang dalam politik juga menghadirkan tantangan tersendiri terhadap integritas dan transparansi partai politik. Praktik ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis dan melemahkan esensi representasi politik yang seharusnya adil dan merata. Oleh karena itu, dalam jurnal ini, kita akan menjelajahi secara mendalam peran dan fungsi partai politik dalam konteks sistem demokrasi saat ini. Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana partai politik dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan kebutuhan politik. Pendekatan ini memberikan latar belakang yang kuat untuk memulai jurnal tentang peran partai politik, serta menawarkan pandangan tentang tantangan dan pertanyaan yang relevan dalam konteks politik saat ini

Praktik klientelisme, yang sering kali didefinisikan sebagai pertukaran keuntungan atau layanan pribadi untuk dukungan politik, telah menjadi fokus utama perhatian dalam analisis politik kontemporer (Mada: 2015). Fenomena ini tidak hanya menggambarkan transaksi politik yang transaksional, tetapi juga mempertanyakan integritas dari proses demokratis itu sendiri.

Dalam beberapa dekade terakhir, praktik klientelisme telah merasuk dalam struktur politik di banyak negara, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini menciptakan dinamika di mana keputusan politik sering kali tidak lagi didasarkan pada kepentingan publik yang luas, tetapi lebih pada kepentingan dan preferensi individu atau kelompok tertentu yang menerima manfaat langsung dari partai politik atau kandidat (Aspinall:2015). Praktik ini sering kali melibatkan penawaran bantuan sosial, proyek infrastruktur, atau pekerjaan

publik sebagai imbalan atas dukungan politik. Meskipun pada awalnya mungkin tampak sebagai upaya untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, dalam praktiknya, klientelisme dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada perwakilan yang adil dan akuntabilitas yang transparan.

Namun demikian, analisis tentang klientelisme tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-ekonomi dan politik setempat. Kondisi struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakpastian ekonomi sering kali menciptakan kondisi di mana praktik klientelisme dapat berkembang subur. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika lokal dan faktor-faktor historis dalam setiap konteks politik sangat penting untuk memahami akar dari fenomena ini. Dari protret saat Pemilu 2024 lalu praktik Klientelisme sangat vulgar dan massif diberbagai lini dan level electoral dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Pembagian bantuan sosial seperti sembako, money politic saat Pemilu 2024 merupakan contoh nyata terjadinya praktik politik di masyarakat. Akhirnya memunculkan karakteristik para pemilih pragmatis – transaksional secara massif. Hal ini sangat jelas mengganggu eksistensi partai politik dan para kandidat atau calon legislatif, calon kepala daerah dalam kontestasi. Bahkan renggangnya ikatan emosional antara pemilih dan partai semakin jauh dan mengkhawatirkan. Ujungnya politik uang sangat mewarnai dalam hajatan electoral, serta kandidat yang sudah keluar banyak uang akan mengembalikan modal saat menjabat nanti.

Dalam demokrasi yang sehat pemilihan kandidat saat pemilu seharusnya berdasarkan kapasitas dan kapabilitas serta kejujuran-keadilan. Namun dengan praktik-praktik Pemilu 2024 tersebut di atas semakin menggambarkan kandidat yang tidak memiliki kemampuan juga akan terpilih jika melakukan praktik-praktik tersebut di atas dengan anggaran besar, dan tidak melalui struktur partai politik. Partai politik hanya sebagai tiket kendaraan untuk mencalonkan diri sesuai peraturan yang berlaku sesuai perundang-undangan. Dengan begitu

praktik kleintelisme tersebut menjadikan partai politik semakin mengalami degradasi dan merusak substansi demokrasi yang berlangsung.

Dalam jurnal ini, kita akan mengeksplorasi lebih jauh tentang praktik klientelisme dalam berbagai konteks politik, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap proses demokratis dan stabilitas politik khususnya partai politik dan akibat yang terbawa. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh sistem politik modern dalam menjaga integritas dan keadilan dalam representasi politik.

B. Kerangka Teori dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori klientelisme yang mana konsep dalam ilmu politik dan sosiologi yang menggambarkan hubungan pertukaran timbal balik yang tidak setara antara aktor politik (patron) dan masyarakat atau pemilih (klien), di mana dukungan politik ditukar dengan imbalan material, perlindungan, atau akses terhadap sumber daya (Aspinal, Mada:2015). Ciri-ciri dari praktik klientelisme ini *pertama*, adanya hubungan Asimetris, yakni patron memiliki kekuasaan, kekayaan, dan koneksi, sementara klien berada dalam posisi ketergantungan. *Kedua* adanya pertukaran transaksional yaitu terjadi barter langsung, seperti pemberian uang, bantuan sosial, atau proyek infrastruktur lokal, sebagai imbalan atas suara (vote) dalam pemilu atau loyalitas politik. Yang *ketiga*, adanya peran perantara (Broker) yang melibatkan perantara lokal (tokoh adat, ketua kelompok tani, atau makelar politik) untuk menyalurkan janji dan bantuan dari elite kepada masyarakat akar rumput. Maka dalam tata kelola pemerintahan, praktik ini seringkali dinilai dapat merusak prinsip meritokrasi dan melanggengkan korupsi politik karena sumber daya publik sering disalahgunakan untuk kepentingan elektoral pribadi.

Berdasarkan diatas praktik kleintelisme menjadi entry point terjadinya perubahan perilaku pemilih yang makin pragmatis-transaksional, mendegradasi tugas fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi dan secara representatif mengganggu asas demokrasi substantif yang seharusnya praktik demokrasi sehat semakin jauh dari harapan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, perspektif, dan konteks individu atau kelompok. Penelitian kualitatif berfokus pada makna dan pemahaman mendalam, memberikan wawasan yang kaya tentang fenomena sosial yang kompleks. Metodologi ini sering digunakan dalam bidang seperti sosiologi, antropologi, pendidikan, kesehatan, dan studi komunikasi. Metode kepustakaan ini dipilih dikarenakan ingin memadukan hasil temuan bertema sama sebagai kajian pendahuluan (*preliminary studies*) dengan kajian penelitian terbaru. Hal tersebut ditujukan untuk verifikasi kajian terdahulu, sekaligus menemukan unsur kebaruan dalam penelitian selanjutnya (Moleong:2021,6).

C. Hasil dan Pembahasan

Partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama untuk mempengaruhi pemerintahan dan kebijakan publik. Partai politik ini biasanya memiliki platform atau program kerja yang mencakup visi, misi, dan nilai-nilai yang ingin mereka implementasikan dalam masyarakat dan pemerintahan. Partai politik juga berperan dalam memilih dan mendukung kandidat untuk berkompetisi dalam pemilihan umum dan mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan.

Peran partai politik dalam sistem demokrasi telah lama dianggap sebagai tulang punggung yang vital dalam mewujudkan representasi politik yang efektif dan pembuatan kebijakan yang berdampak luas. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena lemahnya fungsi partai politik telah menjadi isu yang semakin mendesak untuk dikaji lebih dalam. Partai politik seharusnya berperan sebagai jembatan antara keinginan dan kepentingan masyarakat dengan proses politik formal. Mereka tidak hanya menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mewujudkan solusi atas tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks.

Namun, realitas politik saat ini sering kali menunjukkan bahwa partai politik mengalami tantangan signifikan dalam menjalankan perannya dengan efektif. Faktor-faktor seperti polarisasi politik, fragmentasi ideologis, dan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga politik, semuanya berkontribusi terhadap dilema yang dihadapi oleh partai politik modern. Selain itu, kritik juga sering kali ditujukan kepada partai politik karena mereka terjebak dalam dinamika kemenangan pemilu semata, dengan mengorbankan tujuan jangka panjang untuk keuntungan jangka pendek. Akibatnya, partai politik sering kali gagal dalam mengartikulasikan visi yang jelas atau membangun konsensus yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan publik yang berkelanjutan.

Maka dapat dilihat dalam fenomena klientelisme pada Pemilu 2024 lalu yakni lemahnya fungsi partai politik. Hal ini dapat ditunjukkan dari *pertama*, representasi politik yakni bagaimana partai politik gagal dalam memenuhi peran representatifnya terhadap kepentingan masyarakat luas. Partai-partai sering kali lebih fokus pada strategi kemenangan daripada menyuarakan aspirasi dan kebutuhan rakyat. *Kedua*, dari segi pembuatan kebijakan seringkali menunjukkan bahwa partai politik cenderung tidak mampu menghasilkan kebijakan yang substansial atau mewakili visi jangka panjang yang jelas bagi negara atau daerah. *Ketiga*, pengaruh terhadap Pemilu menggambarkan kelemahan dalam struktur dan fungsi partai politik dapat mempengaruhi proses pemilihan umum, baik dalam hal partisipasi publik maupun dalam penentuan hasil pemilu.

Lemahnya fungsi partai politik pada Pemilu 2024 lalu merupakan fenomena kompleks yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor pula. Beberapa faktor utama yang sering dikaitkan dengan lemahnya fungsi partai politik meliputi; *pertama*, Partai politik kehilangan identitas ideologisnya. Partai politik yang tidak lagi memiliki visi atau misi ideologis yang jelas dapat mengalami kesulitan dalam menarik dukungan dan mempertahankan basis pemilihnya. *Kedua*, adanya praktik korupsi dan klientelisme di dalam partai politik dapat menggerus kepercayaan publik dan mengurangi efektivitas partai

dalam mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Kemudian *ketiga*, kepemimpinan yang lemah, kepemimpinan yang tidak kuat dan efektif dalam mengarahkan strategi politik dan mengatasi konflik internal dapat melemahkan partai politik secara keseluruhan. *Keempat*, fragmentasi dan faksionalisasi di dalam partai politik seringkali membuat pembelahan internal dan munculnya faksi-faksi yang bersaing di dalam partai politik dapat mengganggu koordinasi dan konsolidasi kekuatan politik. *Kelima*, adanya reaksi terhadap perubahan sosial dan ekonomi, yang membuat partai politik yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, atau demografi dalam masyarakat dapat kehilangan relevansi dan daya tarik dalam elektoralnya.

Praktik klientelisme pada Pemilu 2024 lalu menunjukkan praktik politik di mana para pemimpin politik atau partai politik menggunakan posisi atau kekuasaannya untuk memberikan keuntungan atau bantuan kepada individu atau kelompok tertentu secara langsung sebagai imbalan atas dukungan politik mereka. Hal ini sering kali melibatkan pemberian bantuan dalam bentuk program sosial, pekerjaan, proyek infrastruktur, atau kebijakan khusus lainnya kepada para pendukung politik mereka sebagai cara untuk memperkuat basis politik atau mempertahankan kekuasaan. Praktik klientelisme sering dianggap kontroversial karena dapat menyebabkan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya publik dan mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan politik individu atau kelompok tertentu.

Praktik klientelisme semakin merasuk dalam proses politik. Klientelisme merujuk pada praktik di mana partai atau kandidat politik menawarkan imbalan atau keuntungan pribadi kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan politik mereka. Praktik ini tidak hanya mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam politik, tetapi juga bisa merusak esensi demokrasi dengan menggantikan aspirasi publik dengan transaksi politik yang bersifat transaksional. Praktik klientelisme, yang sering kali didefinisikan sebagai pertukaran keuntungan atau layanan pribadi untuk dukungan politik, telah menjadi fokus utama perhatian dalam analisis politik kontemporer. Fenomena ini tidak hanya menggambarkan transaksi politik yang transaksional, tetapi juga

mempertanyakan integritas dari proses demokratis itu sendiri. Dalam beberapa dekade terakhir, praktik klientelisme telah merasuk dalam struktur politik di banyak negara, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini menciptakan dinamika di mana keputusan politik sering kali tidak lagi didasarkan pada kepentingan publik yang luas, tetapi pada kepentingan dan preferensi individu atau kelompok yang menerima manfaat langsung dari partai politik atau kandidat.

Praktik ini sering kali melibatkan penawaran bantuan sosial, proyek infrastruktur, atau pekerjaan publik sebagai imbalan atas dukungan politik. Meskipun pada awalnya mungkin tampak sebagai upaya untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, dalam praktiknya, klientelisme dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada perwakilan yang adil dan akuntabilitas yang transparan. Namun demikian, analisis tentang klientelisme tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-ekonomi dan politik setempat. Kondisi struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakpastian ekonomi sering kali menciptakan kondisi di mana praktik klientelisme dapat berkembang subur. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika lokal dan faktor-faktor historis dalam setiap konteks politik sangat penting untuk memahami akar dari fenomena ini.

Praktik klientelisme pada pemilu 2024 dalam berbagai konteks politik, mengidentifikasi dampaknya terhadap proses demokratis dan stabilitas politik. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh sistem politik modern dalam menjaga integritas dan keadilan dalam representasi politik.

1. Menjamurnya Praktik Klientelisme:

- **Definisi dan Praktik:** Klientelisme dijelaskan sebagai praktik di mana partai atau kandidat politik menawarkan imbalan atau keuntungan pribadi kepada pemilih dalam pertukaran untuk dukungan politik. Praktik ini mencakup distribusi bantuan sosial, pekerjaan publik, atau janji-janji lain yang bersifat transaksional.

- **Dampak terhadap Demokrasi:** Buku ini mengidentifikasi bahwa maraknya klientelisme dapat merusak integritas proses demokratis, memperburuk ketimpangan sosial, dan mengurangi akuntabilitas publik terhadap para pemimpin yang terpilih.

Praktik klientelisme di Indonesia adalah fenomena yang telah lama terjadi dan memiliki dampak yang signifikan dalam politik dan tata kelola pemerintahan. Klientelisme dapat didefinisikan sebagai praktik di mana politisi atau partai politik memberikan imbalan atau pelayanan pribadi kepada pemilih atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik mereka. Hasil dari penelitian lapangan ini menghasilkan praktik klientelisme di Indonesia meliputi:

1. **Pemberian Bantuan Sosial atau Materiil:** Politisi atau partai politik sering kali menawarkan bantuan sosial seperti sembako, bantuan uang tunai, atau proyek pembangunan infrastruktur dalam rangka memperoleh dukungan pemilih.
2. **Jabatan atau Kepentingan Pribadi:** Politisi dapat menawarkan jabatan atau kepentingan pribadi kepada pendukungnya sebagai imbalan atas dukungan politik, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kebutuhan publik secara keseluruhan.
3. **Penggunaan Kekuasaan dan Akses:** Politisi atau partai politik memanfaatkan kekuasaan dan akses mereka ke sumber daya publik untuk memberikan keuntungan kepada pendukung mereka, sering kali melalui perjanjian informal atau tidak transparan.
4. **Koalisi dan Aliansi Politik:** Praktik klientelisme juga dapat terlihat dalam bentuk pembentukan koalisi politik atau aliansi dengan tujuan mendapatkan dukungan dari kelompok atau individu tertentu dengan imbalan keuntungan politik atau ekonomi.

Dampak dari praktik klientelisme bisa mencakup pengurangan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, peningkatan korupsi, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan pemerintahan. Upaya untuk mengurangi atau menghilangkan praktik klientelisme memerlukan

reformasi politik yang komprehensif, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik. Berdasarkan analisis dari penelitian di atas, maka dapat diberikan berbagai solusi yakni revisi undang-undang Pemilu yang lebih terbuka dan jujur adil terhadap persoalan money politic atau vote buying. Biaya saat pemilu cost politic seharusnya melalui partai politik, sehingga akan terjadi ikatan yang kuat antara kandidat, partai politik dan pemilih.

Kemudian bantuan social baik dari pemerintah dan kandidat harus diatur, dan partai politik mengambil peran sebagai katalisator dan jejaring networking yang cukup mata rantai dari pusat hingga bawah. Sehingga fungsi partai politik semakin terasa keberadaannya, tentunya melalui strategi kampanye, marketing politik, branding politik serta ikatan pemilih, partai politik dan kandidat semakin kuat dalam politik electoral ke depan.

D. KESIMPULAN

Praktik Kleintelisme dan relasi Partai Politik dapat didiskripsikan dari Pemilu 2024 beberapa hal, yakni *pertama*, praktik kleintelisme berupa money politic, bantuan social. hutang budi buruh-majikan, dominasi hegemonik kandidat dan pemilih menjadikan bentuk kleintelisme Pemilu 2024 semakin nyata memunculkan pemilih pragmatis transaksional. *Kedua*, Partai politik juga mengalami krisis identitas ideologis dan kurangnya kapasitas untuk secara efektif mewakili kepentingan publik secara menyeluruh. Ini mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai politik sebagai agen perubahan atau representasi yang efektif. Klientelisme memperkuat praktik politik yang transaksional dan berbasis kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, daripada mempertimbangkan kepentingan publik maupun kepentingan partai politik secara luas. Sehingga ikatan “partai-ID” antara pemilih dengan partai politik semakin jauh dan mengganggu serta mendegradasi fungsi partai politik.

Ketiga, Praktik klientelisme dapat menghambat pembangunan demokrasi yang sehat dengan mengurangi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses politik. Hal ini dapat mengancam integritas demokrasi dan kualitas tata kelola politik. Ini juga dapat memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi karena hanya kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan manfaat dari praktik ini. Kesimpulan yang kuat dari penelitian tentang masalah ini adalah perlunya reformasi sistem politik yang mendalam, termasuk meningkatkan regulasi terhadap pendanaan politik, meningkatkan transparansi dalam kebijakan publik, dan memperkuat institusi-institusi demokratis untuk meningkatkan akuntabilitas.

Krisis identitas dan peran partai politik menunjukkan perlunya adaptasi dan reformasi dalam sistem politik untuk menjaga relevansi dan efektivitas partai sebagai lembaga yang mewakili kepentingan publik secara luas dan menjaga stabilitas demokrasi. Dengan memahami dan mengatasi praktik klientelisme, sistem politik dapat bergerak menuju demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, di mana kepentingan publik diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

E. REFERENSI PUSTAKA

- Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot, (Penj. Edisius Riyadi). 2019. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Aspinall, Edward. 2013. "A Nation in Fragments: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia." *Critical Asian Studies*, 45(1), 27-54.
- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2014. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme dalam Pemilu Legislatif*, Polgov, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Dalton, Russell J. dan David M. Farrell: *"Political Parties and Democratic Linkage: How Parties Organize Democracy"*

Hutchcroft, Paul *"Clientelism, Political Parties, and Democratic Development: A Comparative Perspective"*

Martin, Ali. 2010, *Quo Vadis Transisi Demokrasi: Arah Demokratisasi Indonesia di tengah Demokrasi Pasar*. Jurnal Spektrum Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Vol.7 No.1 (2010).
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/SPEKTRUM/article/view/913>

Moleong, Lexy J., 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Rosda Karya.

Surbakti, Ramlan. 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta. PT. Grasindo,

Thomas Pepinsky, Wahyu *"Klientelisme and Urban Governance: The Jakarta Case"*